

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul
Moeloek)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**BAMBANG SUPRIYADI
NPM. 1521020200**



Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA
ROKOK MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul
Moeloek)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**BAMBANG SUPRIYADI
NPM. 1521020200**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., MA.
Pembimbing II: Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek)”**. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan pengertian judul sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur ruangan atau area yang dinyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.² Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang disetujui oleh Gubernur Provinsi Lampung.

¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

²Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 12.

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.³

Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek adalah institusi pelayanan kesehatan tipe A yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Rumah sakit ini berada di Jl. dr. Rivai dan di bawah pengelolaan Pemerintahan Provinsi Lampung.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan maksud dari skripsi judul ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam, kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum” di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek adalah sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana yang berbunyi “Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan yang meliputi

³Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.” Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak yang belum melaksanakan secara maksimal yang seharusnya sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

- b. Dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka mempunyai acuan dan payung hukum yang jelas. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti penerapan peraturan daerah tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeoek.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan disiplin keilmuan yang penulis tekuni di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Konstitusi ini menjelaskan bahwa aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus

⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

senantiasa berdasarkan atas hukum. Karena hal ini mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan. Salah satu di antaranya ialah di bidang kesehatan. Sebab, kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh semua masyarakat tanpa adanya kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Hak kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵ Hal ini juga diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁶

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kesehatan masyarakatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait di bidang kesehatan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dibuat, yaitu : pertama, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lampung diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa pola hidup bersih. Kedua, merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan sebagai

⁵Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pelaksana ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dalam hal ini pemerintah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok.

Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Karena hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Oleh sebab itu peraturan daerah Provinsi Lampung telah menetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, yang tercantum dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Kegiatan Anak-Anak;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Fasilitas Olahraga yang Tertutup;
- f. Angkutan Umum;
- g. Tempat Kerja; dan
- h. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.

Secara tegas pemerintah daerah Provinsi Lampung bertindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan daerah tersebut dan akan dikenakan sanksi pidana, yang diatur dalam Pasal 27, bunyi Pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 27

1. Setiap Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Setiap orang/badan yang mempromosikan mengiklankan, menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.⁷

Berdasarkan aturan di atas sudah cukup jelas bagi siapa yang melanggar aturan peraturan daerah tersebut akan dikenakan sanksi. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak yang melakukan kegiatan merokok di kawasan yang sudah dilarang

⁷Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Terbatas Merokok, Bab XII Ketentuan Umum Pasal 27.

seperti di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Padahal tempat ini adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan.

Menurut ajaran Islam, tidak melarang siapapun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya dengan merokok yang juga bergantung pada kepribadian setiap individu. Islam hanya mengajarkan umatnya tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam selalu menekankan kepada perilaku yang baik-baik dan tidak menyuruh kepada perilaku yang buruk.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ (Q.S. Al-A'raf(7) : 157)

Artinya: “Nabi itu menyuruh kepada mereka yang ma’ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala yang baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia diharapkan mampu membina relasi yang harmonis bukan saja dengan Allah sebagai pencipta tetapi juga antar sesama manusia.⁸

⁸Ridwan, Muhammad.”Implementasi Pembelajaran Lingkungan Hidup Yang Islami,” dalam <http://www.ispi.or.id.23mei> diakses 3 Mei 2019.

Sebagai umat muslim diajarkan untuk menghargai sesama manusia, sesama muslim adalah saudara dan hal ini tentu tidak menginginkan saudaranya mendapatkan musibah. Demikian halnya dengan merokok. Perokok dapat membahayakan saudaranya yang lain dalam hal kesehatan karena perokok pasif lebih berpotensi mengidap kanker dibanding perokok sendiri. Oleh sebab itu, kebiasaan merokok dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti dan mengganggu sesama manusia. Terlebih lagi perbuatan itu dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan larangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek)”**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek.

G. Signifikan Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun antara lain manfaat penelitian yang dapat diberikan :

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
- b. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- d. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.⁹ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁰ Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti guna memperoleh data yang konkret mengenai Implementasi Peraturan Daerah

⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h. 2.

¹⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 33.

Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Deskriptif-Analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.¹¹ Yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Data dan Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi.¹² Dalam hal ini data primer diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

¹¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 29.

¹²Kartini Kartono, *Op, Cit.* h. 28

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian Populasi dan Sample

3. Populasi dan Sample

a. Populasi (sasaran) penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti.¹³ Yang menjadi populasi adalah masyarakat yang terdapat di RSUD. dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. ¹⁴ Adapun yang berkunjung di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek dalam satu hari diwaktu peneliti melakukan observasi di lapangan mencapai 330 orang, 1 subbag umum dan pihak keamanan 2 orang.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengenai dengan teknik *purposive sampling*.¹⁵ *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika

¹³Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 207.

¹⁴Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 202

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Dalam penelitian ini diambil 10%, jadi $333 \times 10\% = 33$. Jadi sampel yang diteliti yaitu berjumlah 33 orang yang terdiri dari 30 pengunjung RSUDAM, 1 kepala subbag umum dan 2 pihak kewanitaan yang terdapat di RSUDAM.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁶ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 137.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden.¹⁷ Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung atau melalui pesawat telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.¹⁸ Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

¹⁸Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 216.

permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹⁹

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁰

¹⁹*Ibid.* h. 205.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai kawasan tanpa rokok sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.¹

Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Islam memandang lingkungan sebagai sesuatu rahmat yang diperuntukan bagi manusia yang harus senantiasa dijaga, dipelihara, dan dilestarikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia, baik individu, kelompok dan masyarakat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hal ini dapat ditemukan didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Ajaran (syari'at) Islam berkenaan dengan kesehatan, seperti melarang perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau orang lain (masyarakat), melainkan selalu menyarankan dan memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai dampak positif, yakni guna mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani untuk diri sendiri maupun orang lain.²

¹Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

²AhsinAl-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 13.

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik dan jiwa, maupun kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota kesehatan berarti menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh karena itu mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat mujarab yang tiada duanya.³

B. Dasar Hukum Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok

1. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berubah. Adapun ayat yang berkenaan dengan larangan merokok dikawasan tanpa rokok ialah :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (Q.S. Al Imran(3) : 110)

³*Ibid.*,h. 15.

Artinya : *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar.”*

Ayat di atas menunjukkan kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang melakukan perbuatan yang mungkar. Rokok berdampak buruk bagi kesehatan baik bagi perokok atau sekitaran perokok tersebut. Al-Qur’an menjadi pedoman untuk menentukan suatu hukum dalam Islam.

2. Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Kaitanya merokok seperti hadist berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ

الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu’anh, Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”*.⁴

Pada dasarnya merokok dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Asap rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membahayakan tubuh manusia.

3. Ijma’ dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqih maupun pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’ tersebut dinyatakan batal. Dalam Islam hukum rokok belum diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan sunnah, oleh sebab itu maka untuk menentukan hukumnya dapat dilakukan dengan cara Ijma’. Adapun dalil Al-Qur’an yang menyatakan tentang ijma’ yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Q.S. An-Nisa(4) : 59)

⁴Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, *Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain*, diakses melalui situs: <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>, Pada Tanggal 23 Juni 2020.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

4. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Rokok banyak menyebabkan beberapa dampak buruk bagi kesehatan baik untuk yang merokok ataupun yang berada dalam lingkungan perokok. Dalam logika, segala sesuatu yang menimbulkan keburukan akan lebih baik jika kita hindari. Namun, jika rokok tersebut membawa hal yang berdampak positif bagi perokok maka dianjurkan untuk merokok. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan dasar-dasar di atas maka dilihat dari bahaya merokok maka dapat disimpulkan bahwa rokok tersebut membahayakan tubuh baik bagi perokok maupun orang sekitarnya. Di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang

mengandung kemudharatan dan berdampak buruk bagi orang lain itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika merokok membawa kemaslahatan bagi perokok tersebut maka dianjurkan untuk merokok.

C. Rokok Dalam Timbangan Darurriyyah Khamsah

Hukum Islam dibangun dengan pertimbangan yang sempurna oleh sang pencipta. Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari kesulitan atau membawa manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Darurriyyah khamsah merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga) lima unsur yang mesti dijaga demi terwujudnya kemaslahatan (*al-maslahat*) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadat*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.⁶

Sebagai landasan dasar untuk menimbang dan menentukan relevansi hukum- hukum yang telah ada, yaitu dengan memperhatikan masalah-masalah yang timbul di muka bumi ini, dalam perumusan hukum tersebut tidak pernah terlepas dari lima unsur dasar yaitu:

⁵Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Diakses melalui situs : <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf> Pada Tanggal 20 Juli 2020

⁶Afridawati, *Tratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)*, (Al-Qistu Vol. 13, No. 1 2015), h. 15. (On-Line) Tersedia Di <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/issue/view/1> (20 Juli 2020), Pukul 06.58 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Memelihara Agama (*al-din*)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya.

2. Memelihara Jiwa (*al-nafs*)

Memelihara (menjaga) jiwa diri manusia (nyawa). Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia untuk melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam melindungi seluruh umat manusia dari segala hal yang membahayakan dan menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah SWT mengharamkan membunuh atau menyakiti manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk bunuh diri. Segala sesuatu yang berdampak buruk untuk diri sendiri maupun orang lain dilarang dalam Islam.

3. Memelihara Akal (*al-aqli*)

Memelihara (menjaga) akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan

untuk memanfaatkan akal untuk mendapat ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal.

4. Memelihara Keturunan (*al-nasl*)

Memelihara (menjaga) Keturunan adalah karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, dalam Islam diwajibkan memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus maka dari itu seseorang dianjurkan untuk menjaga keturunan sejak bayi berada dalam kandungan.

5. Memelihara Harta (*al-mal*)

Memelihara (menjaga) harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu Islam melarang menghambur-hamburkan harta untuk hal yang banyak berdampak buruk bagi kehidupan manusia.⁷

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa: “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah menjadi tujuan makhluk. Baik dan buruknya makhluk sangat tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai. Namun yang dimaksud dengan kemashlahatan disini adalah memelihara tujuan syara’”. Tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk meliputi: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima perkara

⁷Ibnu Abdul Ghofur, *Fenomena Relevansi Fiqh Klasik*, (cet. 2; Kediri: CV. Harapan Mandri, 2006), h. 9

pokok tersebut adalah mafsadah.” Imam Al-Syathibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* berkata “sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.” Rokok mengandung banyak dampak buruk bagi kesehatan baik bagi perokok atau orang yang ada di sekitarnya. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Suatu kemaslahatan harus mempunyai ukuran yang kongkret.⁸

Berdasarkan hal di atas maka ada beberapa ayat yang membahas mengenai kemudharatan yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ
إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ
ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَيسرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَٱحْشَوْنَ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ ۖ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ (Q.S. Al-
Ma'idah(5): 3)

⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 29.

Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah dengan keras melarang hambanya untuk memakan makanan yang haram seperti memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Karna sesungguhnya Allah telah mencukupkan nikmatnya pada semua hambanya.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi diri orang yang memakannya, artinya : makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Dalam Al-Qur'an dan sunnah memang belum dijelaskan secara rinci tentang hukum rokok, namun para ulama melakukan kesepakatan untuk mengharamkan rokok apabila membawa dampak buruk terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, jika merokok dapat membawa dampak baik atau dengan merokok seseorang tersebut dapat menjadi lebih baik maka merokok diperbolehkan.

Apabila dalam menghadapi suatu perkara antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih banyak. Ketika kedua-duanya sama banyaknya atau kuatnya, maka menolak mafsadah lebih baik dari meraih kemaslahatan, sebab menolak suatu kemafsadatan merupakan kemaslahatan.

D. Pandangan Ulama tentang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok

Permasalahan rokok bukanlah masalah baru dalam pembahasan hukum Islam. Sudah lama ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Sanad, dalam bukunya *Nashihah Al-Insan' Ala Isti'mal Al-Dukhan*, rokok dikenal oleh bangsa Eropa sekitar 915 H atau

1518 M, ketika sekelompok pakar mereka menemukan tumbuhan “aneh” di Tobacco (Meksiko). Benihnya mereka bawa pulang dan dari sana tersebar ke daerah-daerah lain, termasuk ke wilayah negeri-negeri Islam. Itu sebabnya tidak ditemukan pendapat ulama masa lalu tentang hukum merokok.⁹

Namun, melalui pemahaman tentang maqashid syari’ah (tujuan agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan persoalan-persoalan “baru” lainnya. Tujuan tuntunan agama adalah memelihara lima hal pokok, yaitu ajaran agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁰ Setiap aktivitas yang menunjang salah satunya, pada prinsipnya dibenarkan atau diterima dalam Islam dan sebaliknya demikian, pembenaran itu bisa mengambil hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

1. Pendapat Ulama yang mengharamkan

Pendapat ini dipegang oleh Al-Qalyubi, Al-Laqqani, Al-Bujairomi dan Asy-Syaranbila. Mereka berpendapat bahwa rokok merusak kesehatan, menyebabkan orang mabuk, tidak berkesadaran, baunya tidak disenangi orang lain, dan dipandang pemborosan.¹¹ Intinya merokok membawa mudharat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Adapun dalil-dalilnya yaitu:

⁹Nurlaila Harun, Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syari’iah, diakses melalui situs : <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/176/151> Pada Tanggal 20 juli 2020.

¹⁰Abdul Aziz Syaikh bin Abdullah, *Fatwa-fatwa terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 1999), h.321.

¹¹Syaikh Ikhsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), h. 14.

a. Memabukkan

Mereka mengatakan bahwa rokok itu memabukkan, sedangkan tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Yang dimaksud dengan memabukkan ialah segala sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat (dialami oleh orang-orang yang pertama kali melakukannya). Artinya, merokok bisa menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akalnya, menjadikan nafasnya sesak, dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini bukan karena lezat dan bukan pula menggigit. Sedangkan sebagian dari mereka tidak memperbolehkan orang yang merokok itu menjadi imam.¹²

b. Melemahkan badan

Mereka berkata, walaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan itu dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Dari Ummu Salamah r.a:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل
مسكرو ومفتتر

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan.” (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

¹²Amidhan, *Dilema Kesajahteraan Umat dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Media Cita, 2000), h. 180.

c. Menimbulkan mudharat

- 1) Mudharat pada badan yaitu menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan dapat menimbulkan penyakit paru-paru yang mengakibatkan kematian

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

(Q.S. An-Nisa' (4) : 29)

Artinya: *“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”*

- 2) Mudharat pada harta yaitu bahwa merokok itu menghambur-hamburkan harta, yakni menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat didunia dan akhirat.¹³ Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah melarang membuang-buang harta, Allah SWT berfirman:

﴿ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۚ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْفِلَ وَلَا

تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيْطَانِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

(Q.S. Al-Isra' (17) : 26-27)

¹³Lubis Nur Fadli, *Kesehatan dan Mental*, (Jakarta: Grafiti PRESS, 1989), h.

Artinya : *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhan nya.”*

2. Pendapat Ulama yang Memakruhkan

Pendapat ini dipegang oleh Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al-Waizh Al-Hanafi berkat: “Kemakruhan bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh,¹⁴ sama halnya dengan memakan bawang merah. Maka asap rokok memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih banyak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan.” Adapun alasan pendapat ulama yang memakruhkan adalah

- a. Bahaya, merokok itu tidak lepas dari dharar (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.
- b. Mengurangi harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sahabatnya dan bagi orang lain.

¹⁴Al-Mawardi Al-Imam, *Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama*, (Jakarta: Dar Ibn Katsir, 2001), h. 481.

- c. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok
- d. Menurunkan harga diri/wibawa bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial terpendang.
- e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna.
- f. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika pada mau saat ia tidak mendapatkan rokok.
- g. Jika perokok menghadiri tempat umum, ia akan mengganggu orang lain.

3. Pendapat Ulama yang Membolehkan

Pendapat ini dipegang oleh Syekh Mushthafa As-Syuthi Ar-Rabbani, ia berkata: “setiap orang yang mengerti tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau bersikap objektif, apabila ia ditanya tentang hukum merokok setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan badan niscaya ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara’ yang mengharamkannya. Adapun alasannya memperbolehkan merokok ini adalah berpegang pada kaidah bahwa asal segala sesuatu itu boleh, sedangkan anggapan bahwa rokok itu memabukkan atau menjadikan lemah itu tidak benar. Memang benar bahwa orang yang

tidak biasa merokok akan merasakan mual bila ia pertama kali melakukannya, tetapi hal ini tidak menjadikan haram. Jika orang menganggap merokok sebagai perbuatan menghambur-hamburkan, maka hal ini tidak hanya terdapat pada rokok.

4. Pendapat Ulama Mutaakhirin

- a. Syekh Hasanain Makhluḥ, mufti Mesir, yang menginventarisasi pendapat sebagian ulama sebelumnya, berpendapat bahwa hukum rokok adalah mubah. Beliau juga mengatakan bahwa keharaman dan kemakruhannya apabila timbul faktor-faktor lain, seperti jika menimbulkan mudharat baik banyak atau sedikit terhadap jiwa maupun harta atau karena mendatangkan mafsadat dan mengabaikan hak istri dan anak-anaknya atau orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya menurut syara'. Apabila terdapat unsur-unsur seperti ini maka hukumnya menjadi makruh atau haram, sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Sebaliknya, jika tidak terdapat dampak negatif seperti itu, maka hukumnya halal.¹⁵
- b. Syekh Muhammad Ibnu Mani' (Ulama Arab Saudi), berkata dalam kitabnya *Ghayatul Muntaha*, sebagai berikut: "Pendapat yang memperbolehkan rokok adalah pendapat orang yang mengigau sehingga tidak perlu dihiraukan. Diantara mudharat yang ditimbulkannya ialah merusak badan, menimbulkan bau yang kurang

¹⁵Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Kontemporer*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003), h. 209.

sedap dan mengganggu orang lain, serta dapat menghambur-hamburkan harta tanpa ada gunanya. Maka janganlah anda terpedaya oleh perkataan orang-orang yang menganggapnya mubah. Sebab, setiap orang boleh diambil atau ditolak perkataannya, kecuali Rasulullah SAW, yang tidak boleh ditolak perkataannya.

- c. Al Maghfur Syekhul Akbar Mahmud Syaltut, Rektor Al-Azhar, di dalam kitab beliau: “Kalaupun tembakau tidak menjadikan mabuk dan tidak merusak akal, tetapi masih menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan tidak merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya diketahui mengandung racun. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan mudharat, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk dan terlarang menurut pandangan Islam. Disisi lain, pengeluaran belanja rokok ternyata lebih banyak, padahal anggaran tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Maka dari sudut pandang ini merokok jelas-jelas dilarang dan tidak diperbolehkan syara’.

5. Pendapat Ulama Indonesia

- a. Fatwa MUI, Salah satu hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat 23 hingga 26 Januari 2009 mengeluarkan fatwa soal hukum haramnya merokok bagi anak-anak, wanita

hamil, dan di tempat umum.¹⁶ Bagi anak-anak, paparan asap rokok bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan dan penyakit. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok berisiko tinggi mengalami iritasi mata, infeksi telinga, alergi, asma, bronkitis, pneumonia, meningitis, dan sindrom kematian bayi mendadak. Bagi ibu hamil rokok dapat berdampak buruk bagi kesehatan baik kesehatan janin. Bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok ini adalah bayi lahir dengan berat rendah, bayi lahir prematur, sindrom kematian bayi mendadak dan keguguran.

- b. Menurut Quraisy Sihab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) tahun 1983 merumuskan “Kesehatan sebagai ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Allah SWT yang wajib disyurukuri dengan mengamalkan tuntunannya dan memelihara serta mengembangkannya.” Memang banyak sekali tuntunan agama yang merujuk kepada tiga jenis kesehatan tersebut. Dalam konteks kesehatan fisik misalnya ditemukan sabda Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menegur sahabatnya yang bermaksud melampaui batas dalam beribadah, sehingga kebutuhan jasmaninya terabaikan dan kesehatannya terganggu. Pembicaraan literatur

¹⁶Mohammad Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2014), h. 70.

keagamaan tentang kesehatan fisik dengan meletakkan prinsip: “pencegahan itu lebih baik dari pada pengobatan”. Tidak merokok merupakan salah satu usaha pencegahan terhadap penyakit. Karena itu kitab suci dan sunah nabi yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Salah satu sifat manusia yang secara tegas dicintai Allah adalah menjaga kebersihan. Kebersihan digandengkan dengan taubat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Allah SWT Berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(Q.S. Al-



Baqarah(2) : 222)

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.

Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh, dan haram itu bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap orang akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi orangnya atau kuantitas yang dikonsumsi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian secara khusus tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sejauh ini belum pernah dilakukan termasuk penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok” sebelumnya belum pernah ada. untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan kawasan tanpa rokok yang pernah di tulis sebelumnya bisa dilihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya :

1. Skripsi yang di tulis oleh Afrizal (140104115) Mahasiswa S1 Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh dengan judul “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam” (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh).¹⁷

¹⁷Afrizal, “*Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam*” Jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018

a. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh.

Pokok permasalahan skripsi ini setelah penulis memberikan kesimpulan Implementasi Qanun Kota Banda Aceh bahwa Pihak RSUDZA sampai saat ini hanya melakukan cara-cara persuasif dengan memberikan teguran kepada pelanggan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Amalia Lathifah (13370060) Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, (studi kasus di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta).¹⁸

¹⁸Amalia Lathifah, “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

a. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif sistem hukum, khususnya di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta?

b. Tujuan Penelitian

untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan untuk menjelaskan peran dinas kesehatan kota yogyakarta nomor 12 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok.

Pokok permasalahan ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang belum di implementasikan secara efektif. ketidak efektifan peraturan walikota tersebut dapat ditinjau dari stuktur, subtansi dan budaya hukum serta belum ada sarana dan prasarana dari dinas kesehatan sebagai penunjang terwujudnya kawasan tanpa rokok.

Dari kedua skripsi tersebut ada persamaan dengan skripsi penulis yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam” yaitu sama-sama membahas tentang implementasi Perda masing masing daerah dan faktor penghambat terwujudnya Perda tersebut.

Dari penelitian di atas semua fokus kepada implementasi Perda masing-masing daerah sedangkan untuk faktor terwujudnya Perda tersebut bukan hanya satu pihak atau pihak keamanan saja yang bekerja melainkan beberapa pihak yang harus bekerja sama agar kawasan tanpa rokok dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Syaikh bin Abdullah, *Fatwa-fatwa terkini*, Jakarta: Darul Haq, 1999
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adrian Sutedi, *Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah*, cet I, sinar grafika (Jakarta:2009)
- Ahsin Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)
- Al-Mawardi Al-Imam, *Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama*, (Jakarta: Dar Ibn Katsir, 2001)
- Amidhan, *Dilema Kesajahteraan Umat dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Media Cita, 2000)
- Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet-7, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Kontemporer*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003)

Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet-4, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Cet-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1994)

Lubis Nur Fadli, *Kesehatan dan Mental*, (Jakarta: Grafiti PRESS, 1989)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986)

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)

Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010)

Mahmud Syalthut, *Al Islam Al 'Aqida wa Syari'ah*, (Mesir: Darul Qalam, 1968)

Mohammad Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2014)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002)

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Terbatas Merokok , Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 13.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Terbatas Merokok , Bab IV Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 13.

Pertimbangan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet-5, Jakarta: Kencana, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Sri Mulyani, *Hukum Merokok dalam Syari'atIslam*, (Banda Aceh: DinasSyari'atIslam Aceh, 2015)

Suguono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)

Syaikh Ikhsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, Yogyakarta: Lkis, 2009

Undang-Undang. No.39 th 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta: Insani Press, 1995. (Terj. oleh As'ad Yasin, judul asli *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Cet- 4, Beirut: Darul Ma'rifah, 1988).

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.

Wikipedia, *Peraturan Daerah (Indonesia)*, Di akses melalui situs

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan Daerah \(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)),
18 juni 2020

Rini Hardiyanti, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3, (18 juni 2020). Diakses melalui
<http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.phpum/article/view/90>

Ridwan, Muhammad.”Implementasi Pembelajaran Lingkungan Hidup Yang Islami,” dalam <http://www.ispi.or.id>, 23mei diakses 17 juni 2020.

Mohammad Rusfi, *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dan Harta*, (Al-Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016), h. 241. (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view> (17 Juni 2020), pukul 23:15 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah